

Judul : Anggaran subsidi rumah menurun 24 persen
Tanggal : Minggu, 03 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Anggaran Subsidi Rumah Menurun 24 Persen **Angka Backlog Makin Tinggi**

Pemerintah diminta lebih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Hal ini menyusul menyusutnya anggaran Pemerintah untuk pengadaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tahun 2024 ini

KETUA Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, alokasi dana pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya sebesar Rp 13,72 triliun untuk tahun 2024. Alokasi anggaran tersebut untuk pembangunan 166 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Hanya saja anggaran rumah subsidi tersebut turun 24 persen dari target 220.000 unit rumah," kata Andi Iwan Darmawan Aras dalam keterangan tertulisnya kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (2/3/2024).

Sebagaimana diketahui, Program FLPP ini merupakan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah *affordability* dan *accessability* khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam program ini, pemerintah membuat kebijakan untuk bisa membantu MBR yang ingin memiliki dan meng-

huni rumah sendiri.

Adapun dukungan anggaran program FLPP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp 13,72 triliun. Jumlah ini turun signifikan jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang jumlahnya mencapai Rp 26,3 triliun.

Andi menilai, penurunan anggaran bantuan rumah subsidi bagi rakyat berpenghasilan rendah ini tentu menjadi perhatian bagi parlemen. Sebab berkurangnya alokasi pemenuhan rumah ini berlangsung di tengah tantangan besar negara mengingat backlog atau kekurangan rumah yang mencapai 12,7 juta rumah.

"Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal seharusnya semakin ditingkatkan karena laju kebutuhan rumah terus bertambah," tegas politisi Fraksi Gerindra ini.



Andi Iwan Darmawan Aras

Dia menegaskan, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal harus menjadi prioritas pembangunan Pemerintah. Hal ini juga menjadi amanat UUD 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal senada dilontarkan anggota

Komisi V DPR Toriq Hidayat. Dia menyayangkan menurunnya alokasi dana FLPP tahun 2024 kecil dibandingkan tahun lalu sebanyak 229.000 unit rumah.

Dia menegaskan, hingga penghujung Tahun 2022 ini saja, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,71 juta. Padahal kebutuhan cenderung meningkat setiap tahunnya.

"Telah kami sampaikan ke pemerintah bahwa angka backlog rumah pada tahun lalu sebesar 12,75 juta. Dibandingkan dengan data saat ini maka hanya berkurang 40 ribu saja. Jumlah tersebut belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 800 ribu setiap tahun," tutur Toriq.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah menyelesaikan problem besar dalam pengadaan rumah subsidi bagi masyarakat kecil ini dengan bekerja lebih efektif. Salah satunya dengan mengoptimalkan program bank tanah dengan harapan suplai terhadap rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini dapat terjamin, mengingat terus meningkatnya harga tanah.

"Selain itu Pemerintah harus memperbanyak jumlah anggaran

program pembangunan rumah melalui skema padat karya. Kegiatan ini pasti mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat. Dan sebaiknya kurang pengeluaran anggaran yang belum penting seperti pembangunan ibu kota baru," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tahun ini Pemerintah hanya mengalokasikan dana bantuan FLPP sebesar Rp 13,72 triliun. Anggaran tersebut untuk membiayai pembangunan 166.000 unit rumah.

Selain itu, juga dialokasikan dana Rp 0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp 0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

Adapun Pemerintah pada tahun 2023 telah menyalurkan Rp 26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp 895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp 52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp 1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera. ■ KAL